

BAB II
GAMBARAN UMUM
DESA ANTI POLITIK UANG

2.1 Gambaran Umum Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Blora

Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Blora merupakan rintisan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora dengan harapan melalui program tersebut dapat menumbuhkan kesadaran politik bagi masyarakat desa (M. Mustain, wawancara penelitian, 3 Oktober 2024). Program Desa Anti Politik Uang di beberapa desa Kabupaten Blora mulai dirintis pada tahun 2019. Inisiatif tersebut dilakukan untuk menyambut Pilkada 2020 sebagai salah satu bentuk upaya proaktif untuk memerangi dan mencegah terjadinya praktik politik uang yang marak terjadi menjelang Pemilu dan pemicu terjadinya korupsi. Dengan adanya program Desa Anti Politik Uang diharapkan Bawaslu mampu menciptakan lingkungan dan situasi politik yang bersih di tingkat desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam mengawal keberlangsungan Pemilu yang berintegritas tanpa adanya pengaruh politik uang di dalamnya.

Bawaslu menargetkan untuk membentuk program Desa Anti Politik Uang minimal satu desa dalam satu kecamatan. Secara keseluruhan, terhitung hingga tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Blora telah mendeklarasikan total 9 desa dan 1 kelurahan di beberapa kecamatan di Kabupaten Blora sebagai Desa Anti politik Uang. Pemilihan desa-desa tersebut untuk dideklarasikan menjadi Desa Anti Politik Uang berdasarkan beberapa kriteria yang telah disepakati bersama oleh Bawaslu Kabupaten Blora. Kriteria tersebut diantaranya dengan

mempertimbangkan kedekatan sosial Bawaslu dengan desa, potensi kerawanan Pemilu, tingkat partisipasi masyarakat, keaktifan kepala desa, dan kesepakatan bersama (M. Mustain, wawancara penelitian, 3 Oktober 2024).

Tabel 2.1

Daftar Desa/Kelurahan Program Desa Anti Politik Uang Kabupaten Blora

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Waktu Pelaksanaan
1	Desa Tutup	Tunjungan	3 Maret 2019
2	Desa Mojorembun	Kradenan	27 Oktober 2019
3	Desa Temulus	Randublatung	27 Oktober 2019
4	Desa Jiworejo	Jiken	13 November 2019
5	Kelurahan Jepon	Jepon	5 Desember 2020
6	Desa Muraharjo	Kunduran	25 Maret 2021
7	Desa Tlogowungu	Japah	12 April 2021
8	Desa Jurangrejo	Bogorejo	9 Juni 2021
9	Desa Ledok	Sambong	31 Agustus 2021
10	Desa Berbak	Ngawen	1 Oktober 2023

Sumber: Arsip Jadwal Pelaksanaan Deklarasi Desa Anti Politik

Uang Bawaslu Kabupaten Blora

Serangkaian kegiatan dilaksanakan sebagai penandaan deklarasi dan komitmen desa-desa yang telah dibentuk sebagai Desa Anti Politik Uang. Sebelum pendeklarasian Bawaslu Kabupaten Blora melakukan koordinasi dengan pihak desa untuk merencanakan proses sosialisasi dan deklarasi. Program Desa

Anti Politik Uang dibagi kedalam 3 tahapan, yaitu pengenalan Bawaslu, sosialisasi di balai desa, dan pendeklarasian dengan penandatanganan MoU (M. Mustain, wawancara penelitian, 3 Oktober 2024). Rangkaian kegiatan tersebut terutama sosialisasi dilakukan untuk membentuk komitmen dan kesadaran masyarakat dalam memerangi praktik politik uang. Kegiatan sosialisasi dikemas dalam bentuk *roadshow* dengan memberikan edukasi masyarakat desa terkait bahaya adanya praktik politik uang dan pentingnya integritas Pemilu. Dalam tahap ini, kegiatan dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan yang melibatkan unsur-unsur masyarakat, termasuk tokoh agama, karang taruna, dan ibu-ibu PKK. Pertemuan-pertemuan tersebut diadakan setidaknya empat hingga lima kali dengan tujuan informasi yang disampaikan dapat menjangkau hingga lapisan terkecil dari masyarakat desa.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu juga dikemas dalam bentuk forum grup diskusi yang interaktif, dimana dalam forum grup diskusi tersebut masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dengan menyampaikan aspirasi mereka. Dalam forum diskusi tersebut tidak hanya dilakukan penyampaian informasi terkait dengan bahaya politik uang, namun masyarakat diajak untuk berdiskusi terkait dengan bahaya dan dampak negatif dari praktik politik uang serta mencari jalan tengah atau solusi untuk mencegah terjadinya praktik politik uang. Sesi tanya jawab juga dibuka dalam serangkaian kegiatan tersebut, melalui sesi tanya jawab masyarakat dapat menyampaikan kekhawatiran dan pandangan mereka yang akan mendapatkan respon secara langsung dari Bawaslu Kabupaten Blora selaku pihak penyelenggara.

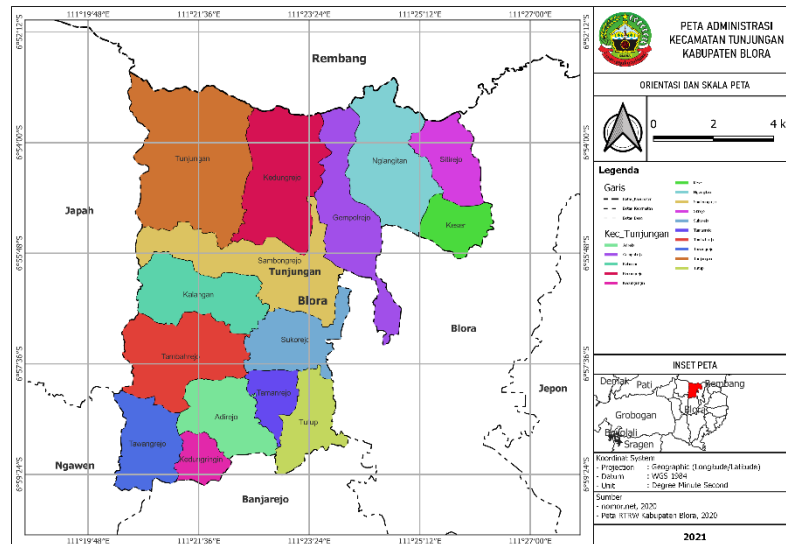
Salah satu kegiatan simbolis dalam kegiatan deklarasi Desa Anti Politik Uang tersebut yaitu penandatanganan banner dan pendirian palang sebagai simbol dari komitmen masyarakat desa dalam memerangi upaya praktik politik uang. Pendirian palang tersebut dilakukan di beberapa lokasi strategis setiap desa, seperti balai desa. Melalui serangkaian kegiatan partisipatif dan inklusif tersebut, Bawaslu Kabupaten Blora berharap kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan bagi masyarakat, namun mampu meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat desa dalam memerangi praktik politik uang, serta menciptakan budaya politik yang bersih di tingkat desa.

2.1.1 Gambaran Umum Desa Anti Politik Uang di Desa Tutup Kecamatan

Tunjungan, Kabupaten Blora

Desa Tutup terletak di Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang memiliki luas wilayah sebesar 3,47km². Desa Tutup terbagi menjadi beberapa dukuh yaitu Dukuh Tutup, Dukuh Ngetrep, dan Dukuh Sukorame. Pusat pemerintahan Desa Tutup terletak di Dukuh Tutup yang menjadi pusat pelayanan publik dan koordinasi bagi seluruh masyarakat Desa Tutup. Secara geografis Desa Tutup berbatasan langsung dengan Desa Sukorejo di wilayah Utara, Kelurahan Tambahrejo dan Kelurahan Sonorejo di wilayah Timur, Desa Buluroto di wilayah Selatan, Desa Tamanrejo di wilayah Barat, serta memiliki jarak 4,3 km atau sekitar 9 menit dari pusat kota dan pemerintahan Kabupaten Blora.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora



Sumber: tunjungankec.blorakab.go.id

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Desa Tutup mencapai 5.424 penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.671 jiwa dan perempuan sebanyak 2.753 jiwa yang tersebar dalam 31 RT dan 3 RW. Berdasarkan jumlah tersebut Desa Tutup menjadi desa dengan konsentrasi penduduk terbesar di Kecamatan tunjungan dengan persentase penduduk sebesar 10,91% dan kepadatan penduduk sebesar 1732,91 jiwa per km², angka tersebut menunjukkan tingginya tingkat kepadatan penduduk di Desa Tutup (BPS Kabupaten Blora, 2023).

Tabel 2.2

Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tunjungan Tahun 2022

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk/Km ²
1	Tutup	2.671	2.753	5.424	1732,91
2	Sukorejo	2.263	2.165	4.428	838,64
3	Tambahrejo	2.186	2.206	4.392	581,72

4	Gempolrejo	2.016	2.039	4.055	700,32
5	Tunjungan	1.921	1.907	3.828	128,89
6	Sambongrejo	1.894	1.897	3.791	560,80
7	Tamanrejo	1.813	1.791	3.604	1264,56
8	Kalangan	1.591	1.625	3.216	601,12
9	Kedungrejo	1.572	1.568	3.140	342,79
10	Keser	1.557	1.580	3.137	1201,92
11	Adirejo	1.284	1.356	2.640	519,69
12	Nglangitan	1.249	1.265	2.514	332,54
13	Tawangrejo	1.083	1.106	2.189	477,95
14	Sitirejo	1.081	1.081	2.162	472,05
15	Kedungringin	578	616	1.194	648,91
Jumlah Kecamatan Tunjungan		24.759	24.955	49.714	488,25

Sumber: Kecamatan Tunjungan dalam Angka 2023

Dalam segi ekonomi, masyarakat Desa Tutup rata-rata berada dalam golongan ekonomi menengah dan tercatat hingga tahun 2023 Desa Tutup memiliki indeks ketahanan ekonomi sebesar 0.8833 yang menunjukkan kestabilan ekonomi cukup baik. Mayoritas masyarakat Desa Tutup bekerja di sektor wiraswasta yaitu bekerja sebagai pedagang. Selain itu, masyarakat Desa Tutup juga ada yang bekerja sebagai perantau atau buruh pabrik. Secara umum, data terkait pendidikan masyarakat Desa Tutup tidak tertera, sehingga data terakhir yang bisa diakses adalah data monografi tahun 2020 yang menyebutkan bahwa rata-rata pendidikan masyarakat Desa Tutup merupakan lulusan SLTA yang langsung mencari pekerjaan setelah tamat sekolah SiDesa Jateng, diakses 10 September 2024).

Desa Tutup dikenal dengan komitmennya yang tinggi terhadap integritas Pemilu, sehingga menjadi desa pertama yang dinobatkan menjadi salah satu Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Blora pada 3 Maret 2019 (M. Mustain, wawancara penelitian, 3 Oktober 2024). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kemauan mandiri dan komitmen yang dimiliki masyarakat Desa Tutup untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas dan terbebas dari praktik politik uang. Deklarasi sebagai Desa Anti Politik Uang dilakukan dengan penandatanganan secara simbolis spanduk berukuran besar oleh warga Desa Tutup dan dilanjutkan dengan membentuk satuan tugas dan relawan untuk memerangi praktik politik uang dalam Pemilu di Desa Tutup.

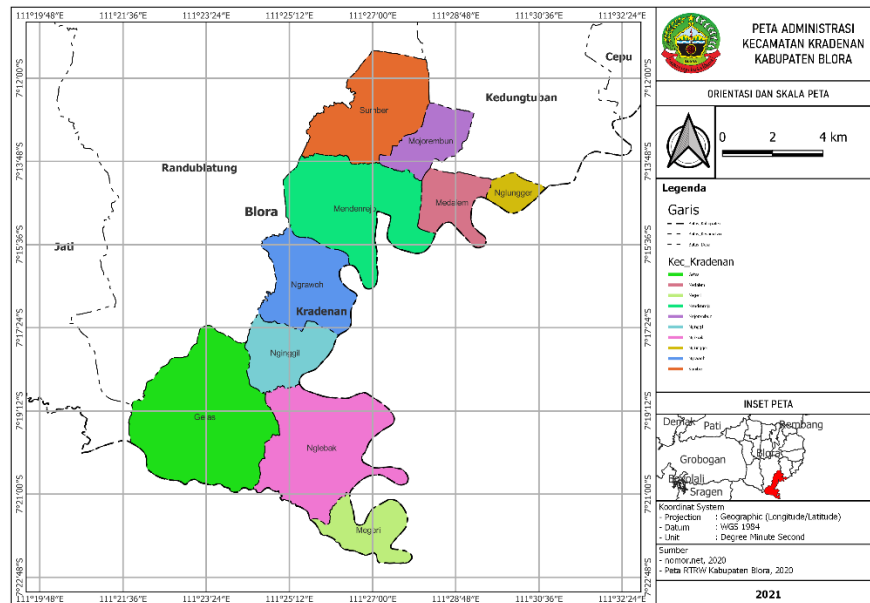
2.1.2 Gambaran Umum Desa Anti Politik Uang di Desa Mojorembun

Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora

Desa Mojorembun terletak di Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dan memiliki luas wilayah sebesar 5,46km². Desa Mojorembun terbagi menjadi 4 dusun yaitu Dusun Sendangtiko, Dusun Mojorembun, Dusun Sonorejo, dan Dusun Banjarejo. Secara geografis, Desa Mojorembun berbatasan dengan Desa Sumber di wilayah Utara dan Barat, Desa Mendenrejo di wilayah Selatan, serta Desa Ketuwan di wilayah Timur. Letak Desa Mojorembun relatif jauh dari pusat kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Blora, yakni berjarak sekitar 42 Km dan memerlukan waktu sekitar 1 jam 4 menit memungkikankan juga menjadi daerah yang berada cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Blora.

Gambar 2.2

Peta Administrasi Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora



Sumber: kradenankec.blorakab.go.id

Pada tahun 2022, penduduk Desa Mojorembun mencapai 3.147 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.600 jiwa dan perempuan sebanyak 1.547 jiwa. Populasi penduduk tersebut tersebar dalam 14 RT dan 4 RW dengan kepadatan penduduk sebesar 576,37 jiwa per Km². Berdasarkan jumlah tersebut Desa Mojorembun memiliki persentase penduduk sebesar 7,41% dari jumlah total penduduk Kecamatan (BPS Kabupaten Blora, 2023).

Tabel 2.3**Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kradenan Tahun 2022**

NO	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk/Km²
1	Megeri	947	948	1.895	348,35
2	Nglebak	1.534	1.515	3.049	169,86
3	Getas	2.105	2.059	4.164	174,08
4	Nginggil	202	220	422	48,56
5	Ngrawoh	268	268	536	54,53
6	Mendenrejo	6.347	6.292	12.639	677,33
7	Sumber	5.488	5.502	10.990	766,39
8	Mojorembun	1.600	1.547	3.147	576,37
9	Medalem	1.644	1.624	3.268	607,43
10	Nglungger	1.183	1.178	2.361	1000,42
Total Kecamatan Kradenan		21.138	21.153	42.471	379,10

Sumber: blorakab.bps.go.id

Dalam segi ekonomi, rata-rata masyarakat Desa Mojorembun berada pada golongan ekonomi menengah. Sebagian besar masyarakat Desa Mojorembun bekerja dalam sektor pertanian sebagai petani atau pemilik sawah dan buruh tani. Pada tahun 2023, indeks ketahanan ekonomi Desa Mojorembun berada pada angka 0,6333 yang menunjukkan kestabilan ekonomi desa yang moderat. Sementara itu, dalam segi pendidikan, secara umum data pendidikan masyarakat Desa Mojorembun tidak tertera, sehingga data terakhir yang dapat diakses adalah data monografi tahun 2020 yang menyebutkan bahwa rata-rata pendidikan masyarakat Desa Mojorembun merupakan lulusan SLTP dan langsung mencari

kerja setelah tamat sekolah salah satunya sebagai buruh tani (SiDesa Jateng, diakses 10 September 2024).

Dalam segi politik, Desa Mojorembun memiliki peran aktif dan secara resmi menjadi salah satu Desa Anti Politik Uang pada Tahun 2019 setelah Desa Tutup Kecamatan Tunjungan. Pendeklarasian sebagai Desa Anti Politik Uang disahkan langsung oleh Lulus Mariyonan selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Blora pada periode tersebut. Pengesahan dilakukan secara simbolis yang dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat Desa Mojorembun. Pengesahan tersebut dilakukan dengan pendirian palang dan penandatanganan MoU sebagai bentuk komitmen masyarakat desa terhadap Pemilu yang bersih dari praktik jual beli suara. Pembentukan Desa Anti Politik Uang di Desa Mojorembun diharapkan mampu menjaga kualitas Pemilu yang berintegritas dan melahirkan calon pemimpin yang mumpuni, serta terhindar dari adanya praktik politik uang (Bawaslu Kabupaten Blora, 2019).